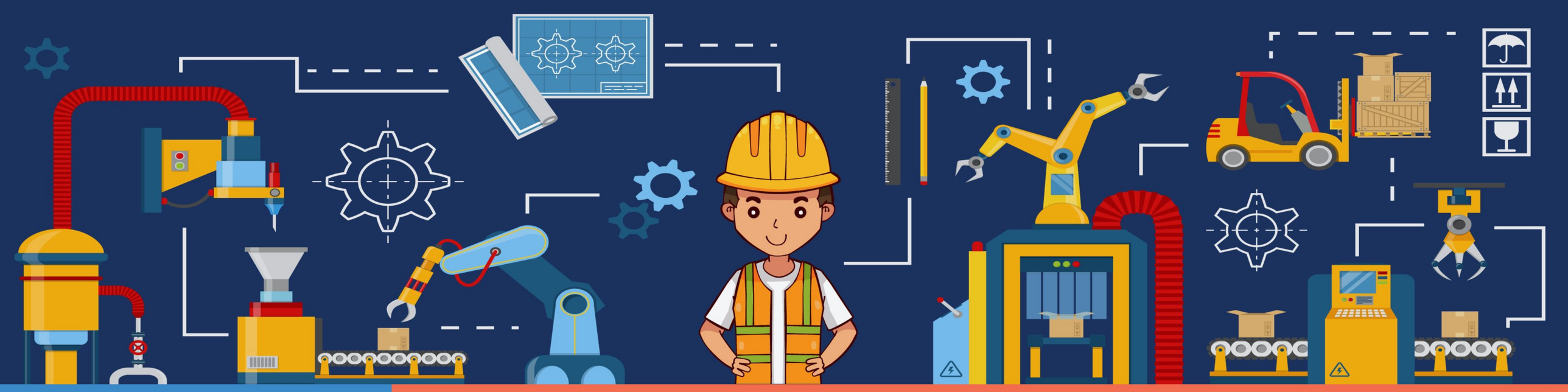

REVOLUSI INDUSTRI 4.0?

Revolusi industri 4.0 merupakan integrasi antara **dunia internet** atau **online** dengan dunia usaha atau produksi di sebuah industri yang dapat berdampak pada hilangnya berbagai jenis pekerjaan.

INDUSTRI 1.0

1784

Mechanical Production, Water and Steam

INDUSTRI 2.0

1870

Electronic Powered Assembly Line, Mass Production

INDUSTRI 3.0

1969

Automation, Computers and Electronics

INDUSTRI 4.0 TODAY

Cyber Physical System, Internet of Things, Smart Technologies

- *Artificial Intelligence*
- *Virtual Reality*
- *Big Data Analysis*

Pekerjaan yang mungkin digantikan mesin:

- Kasir
- Petugas Administrasi
- Auditor
- Petugas Pemasaran
- Akuntan

WORLD ECONOMIC FORUM 2018

Memperkirakan **133 juta pekerjaan global** akan diciptakan dengan bantuan kemajuan teknologi selama dekade berikutnya

Peluang!

Pekerjaan yang memerlukan keterampilan tingkat tinggi.

- Programmer
- E-Commerce
- Digital Platform
- Operator Mesin

Indonesia perlu mempersiapkan tenaga kerja terampil melalui pendidikan dan pelatihan vokasi

YAYASAN TIFA

infid International NGO Forum on Indonesian Development

PRAKARSA Welfare Initiative for Better Societies

Perkumpulan Prakarsa

theprakarsa

www.theprakarsa.org

APAKAH SDM INDONESIA SIAP BERSAING?

Dimulainya revolusi industri 4.0 ditandai dengan hadirnya digitalisasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat, dunia bisnis dan sektor industri

Namun, sayangnya masih ada GAP antara kebutuhan pasar kerja dengan tenaga kerja yang tersedia

Kondisi tenaga kerja di Indonesia

Pekerja berkeahlian rendah masih mendominasi pasar kerja 2018, didominasi oleh SMP kebawah.

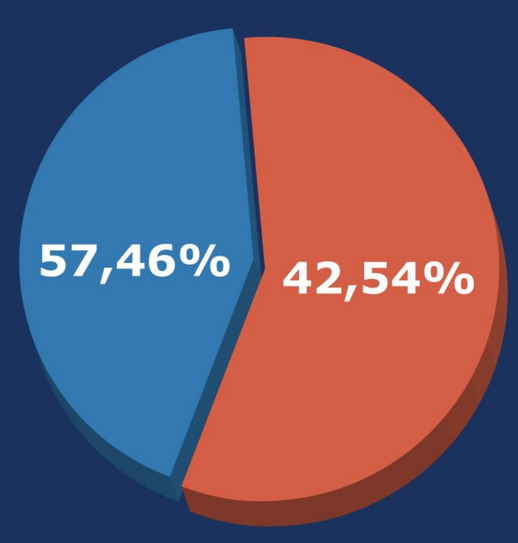

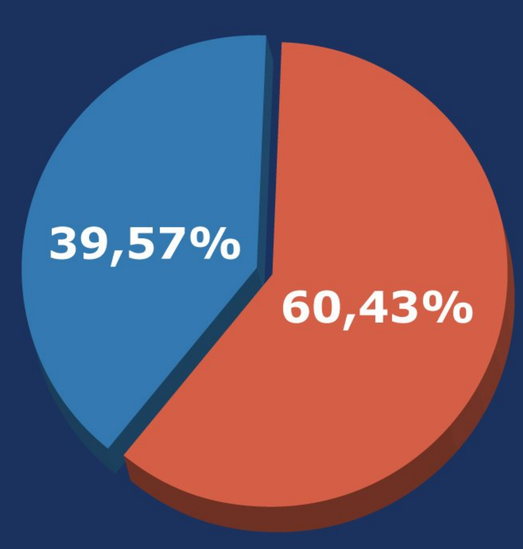

- SMP ke bawah
- SMA ke bawah

- Berkeahlian Menengah
- Berkeahlian Rendah

Berkeahlian Rendah adalah pekerja yang hanya mengandalkan tenaga saja

Berkeahlian Menengah adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman

Sumber Sakernas Agustus 2018, diolah

Lapangan kerja informal masih tinggi dan didominasi oleh tenga kerja berpendidikan terakhir SMP ke bawah

INFORMAL 57%	FORMAL 43%
75,6% SMP kebawah	**36,6%** SMP kebawah
14,2% SMA	23,0% SMA
6,9% SMK	16,4% SMK
3,3% Diploma - Universitas	24,0% Diploma - Universitas

- Tingginya pekerja di sektor informal disebabkan karena *missmatch* antara rendahnya *skill* yang dimiliki dan ketersediaan lapangan kerja.
- Selain itu, karena kurangnya rekognisi dari pemerintah atas bidang-bidang pekerjaan informal dan rendahnya perlindungan tenaga kerja informal

YAYASAN TIFA
infid International NGO Forum on Indonesian Development
PRAKARSA Welfare Initiative for Better Societies
Perkumpulan Prakarsa
theprakarsa
www.theprakarsa.org

MEMPERBAIKI SDM TENAGA KERJA MELALUI PELATIHAN VOKASI

Pelatihan vokasi adalah pelatihan yang bertujuan menciptakan tenaga kerja yang terampil dalam keahlian tertentu

Untuk dapat bertahan di pasar kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak, angkatan kerja perlu didorong untuk meningkatkan *skill* dan kompetensi salah satunya melalui **lembaga-lembaga pelatihan kerja pemerintah, swasta dan komunitas.**

Hasil riset Prakarsa 2018, menunjukan hanya 14% (dengan 787 orang) responden yang pernah mengikuti pelatihan vokasi dalam 1 tahun terakhir. Hanya **11% yang mengikuti magang** dan hanya **21%** peserta pelatihan yang menyatakan ada penempatan kerja langsung.

TANTANGAN

permasalahan utama antara lain dari sisi *suply*, sisi *demand*, kesenjangan informasi dan institusi dan koordinasi

Dampak jika tidak diatasi segera maka akan berakibat pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Yang dapat dilihat dari beberapa indikator:

- Transformasi struktural ke arah jasa keahlian rendah (*low end service*)
- Tingginya proporsi tenaga kerja berkeahlian rendah dan
- Upah rendah.

*Terlebih lagi menurut Kemnaker angkatan kerja baru yang perlu mendapatkan pelatihan (mismatch & underqualified) yakni rata rata **2 jt orang/tahun**.*

KOMITMEN ANGGRAAN PENGEMBANGAN PELATIHAN VOKASI MASIH CUKUP RENDAH

Rp 2,9 triliun

Anggaran Kemnaker tahun 2019

Perbaikan pelatihan vokasi membutuhkan komitmen anggaran

Rp minimum 20 triliun

Merujuk pada OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

Biaya minimum pelatihan vokasi per orang per tahun mencapai Rp 10-20 jt/org. Jika per tahun Indonesia memiliki kepentingan melatih 2 jt orang, maka anggaran minimum yang dibutuhkan adalah 2.000.000 x Rp. 10.000.000 = 20.000.000.000.000

YAYASAN TIFA
infid International NGO Forum on Indonesian Development
PRAKARSA Welfare Initiative for Better Societies
Perkumpulan Prakarsa
theprakarsa
www.theprakarsa.org

PRAKTIK BAIK PELATIHAN VOKASI SAAT INI

Temuan studi Prakarsa 2018, sudah terdapat praktik baik vokasi yang membutuhkan replikasi dengan dukungan

Tiga praktik baik berdasarkan penelitian Perkumpulan Prakarsa 2018, antara lain:

BBPLK CEVEST BEKASI

Di bawah Pemerintah Pusat (Kemnaker)

Bekerja sama dengan **78 perusahaan**

Program **pemagangan**

Pelatihan keterampilan yang **tersertifikasi**

Penyaluran kerja ke perusahaan mitra dan pelatihan

70%

Siswa Latih Masuk Pasar Kerja

BLKD KABUPATEN BOGOR

Di bawah Pemerintah Daerah

Rp 3 Miliar

Komitmen anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk penyelenggaraan BLK

(30% dari total belanja langsung Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor) pada anggaran tahun 2019.

YAYASAN TEKNIK SAMICK INDONESIA (YTSI)

Didirikan dan dikelola oleh PT Samick

PT Samick aktif bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja terampil yang dapat disediakan oleh YTSI

95%

Siswa Latih Masuk Pasar Kerja

Rp 2,4 Jt/bulan

Pada saat pemagangan, PT Samick dan perusahaan mitra YTSI memberikan insentif

1% Profit Perusahaan

Dukungan pembiayaan dari perusahaan mitra untuk penyelenggaraan YTSI

YAYASAN TIFA

infid International NGO Forum on Indonesian Development

PRAKARSA Welfare Initiative for Better Societies

Perkumpulan Prakarsa

theprakarsa

www.theprakarsa.org

USULAN PERBAIKAN PELATIHAN VOKASI

ANGGARAN

Pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkelanjutan, sekurang-kurangnya **5-10%** untuk pelatihan vokasi dari total alokasi anggaran pendidikan nasional (tahun 2019 alokasi anggaran Pendidikan Rp. 492,5 triliun).

SKEMA PEMBIAYAAN ALTERNATIF

Pemerintah pusat dan daerah perlu mengembangkan skema pembiayaan alternatif untuk pelatihan vokasi yang bersumber dari kontribusi sektor swasta

KUOTA PEKERJAAN

Pihak swasta perlu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pelatihan vokasi dan memberikan kuota pekerjaan bagi siswa latih pelatihan vokasi

KOMUNITAS

Pemerintah pusat perlu memastikan keberlanjutan penyelenggaraan BLK Komunitas yang lebih merata dan berkualitas

MENAMBAH JUMLAH BBPLK

Pemerintah pusat perlu menambah jumlah BBPLK, sekurang-kurangnya satu BBPLK di setiap provinsi dengan fokus materi pelatihan sesuai dengan keunggulan daerah. BBPLK akan memberikan asistensi yang memadai kepada BLK Kabupaten/Kota dan BLK Komunitas

REGULASI

Pemerintah perlu membuat regulasi yang mendorong partisipasi sektor swasta dalam pelatihan vokasi dan pengaturan pemberian insentif fiskal dan non-fiskal bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan vokasi

MENGEMBANGKAN INOVASI

Pemerintah daerah dan pusat harus memberikan kepercayaan kepada BLK dan BBPLK untuk mengembangkan inovasi-inovasi (pembaruan modul, peremajaan peralatan pelatihan dan bekerja sama dengan pihak swasta, dan lain-lain) dan menempatkannya sebagai garda depan peningkatan kualitas tenaga kerja terampil Indonesia.

YAYASAN TIFA
infid International NGO Forum on Indonesian Development
PRAKARSA Welfare Initiative for Better Societies
Perkumpulan Prakarsa
theprakarsa
www.theprakarsa.org